

DAFTAR PUSTAKA

- B.H. Erickson dan TA. Nosamchuk, *Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1991.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.
- Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, PT. remadja Karya, Bandung, 1995.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi research Sosial*, alumni, Bandung, 1990.
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Mohammad Hatta, *Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 1990.
- Philippus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Jakarta, 1997.
- RA, Suhardi, *Politik Sosial Modern, Dasar dan Directiva*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 1993.
- Rian Nugroho, *Sistem Otonomi di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2001.
- S.L.S. Danuredjo, *Otonomi di Indonesia Ditinjau Dalam Rangka Kedaulatan*, Jakarta, 1997.
- Saleh Syariff, *Otonomi dan Daerah Otonom*, Endang, Jakarta, 1993.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Rian Nugroho Dwidjowijoto, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Elex Media-Gramedia, Jakarta, 2000.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1990.

Y.W. Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Erlangga, Jakarta, 1997.

_____, *Efektivitas Otonomi Daerah Baru Dalam Kemandirian Daerah*, Erlangga, Jakarta, 2000.



DAFTAR WAWANCARA

Ditujukan Bagi Camat Kecamatan Medan Tembung :

1. Apakah Bapak mengetahui tujuan dan fungsi otonomi daerah ?
2. Bagaimana perwujudan otonomi daerah terhadap pelaksanaan kinerja camat ?
3. Apakah sistem otonomi daerah yang baru mampu memberikan kontribusi kepada pihak kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan ?
4. Bagaimana bentuk sosialisasi pelaksanaan otonomi daerah kepada masyarakat ?
5. Adakah hal-hal yang berhubungan dengan otonomi daerah yang menghambat pekerjaan kecamatan ?
6. Bagaimana kedudukan kecamatan dalam sistem otonomi daerah yang baru ?
7. Apakah keberadaan instansi kecamatan memiliki keterkaitan dalam hal terwujudnya otonomi Daerah ?

Terima-kasih